

**PERTIMBANGAN DPR PADA PENGUBAHAN
KEMENTERIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

DARA MANISTA HARWIKA

NBI: 1311800012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERTIMBANGAN DPR PADA PENGUBAHAN KEMENTERIAN DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

SKRIPSI



Oleh:

DARA MANISTA HARWIKA

NBI: 1311800012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PERTIMBANGAN DPR PADA PENGUBAHAN KEMENTERIAN DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

DARA MANISTA HARWIKA

NBI : 1311800012

Dosen Pembimbing:

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

**PERTIMBANGAN DPR PADA PENGUBAHAN KEMENTERIAN DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

Oleh:

DARA MANISTA HARWIKA

NBI : 1311800012

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 10 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:034/ST/FH/I/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

• TIM PENGUJI:

Ketua

: Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H

NPP: 20310130611

30/Jan/2022

Sekretaris

: Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H

NPP: 20310190808

yif

Anggota

: Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

Abuww

NPP: 20310160711

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

iii

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Manista Harwika

NBI : 1311800012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di The 1ST ICSLS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SHARIA AND LEGAL STUDIES 2021, dengan judul :

***HOUSE OF REPRESENTATIVE'S DELIBERATION ON CHANGING
MINISTRIES IN THE PERSPECTIVE OF PRESIDENTIAL SYSTEM***

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Dara Manista Harwika

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dara Manista Harwika
Program Studi : Ilmu Hukum
NBI : 1311800012
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di The 1ST ICSLS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SHARIA AND LEGAL STUDIES 2021, dengan judul :

***HOUSE OF REPRESENTATIVE'S DELIBERATION ON CHANGING
MINISTRIES IN THE PERSPECTIVE OF PRESIDENTIAL SYSTEM***

Benar bebas dari publikai ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Dara Manista Harwika

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Manista Harwika
NBI : 1311800012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

PERTIMBANGAN DPR PADA PENGUBAHAN KEMENTERIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dara Manista Harwika

NBI : 1311800012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul :

PERTIMBANGAN DPR PADA PENGUBAHAN KEMENTERIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Dara Manista Harwika

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dara Manista Harwika

NBI : 1311800012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul :

PERTIMBANGAN DPR PADA PENGUBAHAN KEMENTERIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Dara Manista Harwika

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Nenek dan kakak perempuan, Sumanikah dan Putri Ayu Hardika S.Pd, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
4. Bapak Dr. Syofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan banyak solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penelitian skripsi ini serta yang dengan sabar bersedia saya berikan banyak pertanyaan terkait penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman sobat PERSAMBATAN DUNIAWI yaitu, Adetya Firnanda, Akbar Prasetyo Sanduan, Margareta Sevilla Rosa Angelin, dan Amelia Puspitasari.
7. Teman-teman di dalam DPM FH Untag Surabaya masa kerja 2021-2022 yang telah memberikan banyak dukungan dalam banyak bentuk dari awal mengerjakan skripsi ini.
8. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu,

peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang pemerhati ketatanegaraan Indonesia.

Surabaya, Desember 2021
Peneliti



(Dara Manista Harwika)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri
Terimakasih telah berjuang selama ini dan
tetap hidup hingga detik ini*

Abstrak

Di era modern sistem pemerintahan Indonesia yang semakin condong ke arah *legislative heavy* membuat kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dipertanyakan, padahal idealnya sistem pemerintahan presidensial menjamin kebebasan kekuasaan eksekutif (Presiden) untuk menangani hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh kekuasaan legislatif. Presiden dinilai tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sepenuhnya karena banyak hal yang mengharuskan adanya pertimbangan DPR. Hal tersebut terjadi karena di dalam beberapa pasal undang-undang mengharuskan adanya pertimbangan DPR untuk pengangkatan, dan pemberhentian jabatan pemerintahan tertentu misalnya pengubahan formasi kementerian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis isu hukum yang akan diteliti, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang membandingkan dua sistem hukum dari negara yang berbeda. Dari pendekatan ini peneliti dapat menggunakan pisau analisis dalam mencari jawaban atas isu hukum dari penelitian skripsi ini.

Berdasarkan analisis bahan hukum yang diperoleh kesimpulannya bahwa pengaturan pemberian pertimbangan DPR tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial karena:

- a. Prinsip *check and balances* yang diterapkan membatasi kekuasaan Eksekutif Presiden
- b. Terjadi peleburan kekuasaan akibat pengaturan pemberian pertimbangan DPR
- c. Adanya supremasi Legislatif bukan supremasi konstitusi.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah diperlukan adanya undang-undang baru yang mengakomodir perubahan terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Kementerian Negara sehingga menjadi lebih jelas bahwa prinsip *check and balances* tidak membatasi kekuasaan eksekutif.

Kata kunci: pertimbangan DPR, pengubahan Kementerian, Presiden

Abstract

In the modern era, the Indonesian government system which is increasingly leaning towards legislative heavy makes the position of the President as head of government questionable, even though ideally a presidential government system guarantees the freedom of executive power (President) to handle matters that cannot be reached by legislative power. The President is considered unable to carry out his functions and duties fully because there are many things that require the DPR's consideration. This is because several articles of the law require the DPR to consider the appointment and dismissal of certain government positions, such as changing the formation of ministries.

This research is legal research. The problem approach used to answer the legal issue is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations. The conceptual approach is used to examine and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis for the legal issues to be studied, and the comparative approach, which is an approach that compares two legal systems from different countries. From this approach, the researcher can use an analytical knife in finding answers to the legal issues of writing this thesis.

Based on the analysis of legal materials, it can be concluded that the arrangement for giving consideration to the DPR is not in accordance with the presidential government system because:

- a. The principle of checks and balances applied limits the executive power of the President*
- b. There was a fusion of power due to the arrangement of giving consideration to the DPR*
- c. Legislative supremacy is not constitutional supremacy.*

The suggestion that can be given is that there is a need for a new law to accommodate changes to several articles in the Law on State Ministries so that it becomes clearer that the principle of checks and balances does not limit executive power.

Keywords: *DPR considerations, changing the Ministry, the President*

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Konsep Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Power</i>)	11
2.1.1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan	11
2.1.2. Perbedaan Pemisahaan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan	16
2.2. Sistem Pemerintahan Presidensial	18
2.2.1. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial	18
2.2.2. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial	20
2.2.3. Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer	23
2.2.4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial	25
2.3. Konsep Check and Balances.....	27
2.3.1. Pengertian Check and Balances.....	27
2.3.2. Cara-cara Penerapan Prinsip check and balances	29

2.3.3. Ruang Lingkup Prinsip check and balances	30
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1. Makna frase “pertimbangan DPR” dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	31
3.2. Pengaturan Pemberian Pertimbangan DPR pada Pengubahan Kementerian dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial	49
3.2.1. Kedudukan Kementerian dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	49
3.2.2. Pengaturan Pengubahan Kementerian di Amerika Serikat dan Filipina	57
3.2.3. Analisis pengaturan pemberian Pertimbangan DPR dalam perspektif sistem pemerintahan Presidensial.....	75
BAB IV PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran	83

DAFTAR BACAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbedaan Makna Kata Pertimbangan dan Persetujuan DPR44